

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Skripsi, Agustus 2024

DESTI SETIAWATI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI
SOSIAL DALAM PELAYANAN PELINDUNGAN PURNA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) KAWASAN ASIA DAN AFRIKA**

XVI+180 Halaman+1 Tabel+6 Lampiran

ABSTRAK

BP2MI menyelenggarakan layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), salah satunya dalam pelayanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Berdasarkan data BP2MI, kegagalan pelayanan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini menjadikan pelayanan terhadap purna Pekerja Migran Indonesia tidak efektif dan berkualitas, Ombudsman RI melakukan kajian terkait Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI yang tidak memberikan pelayanan kepada purna PMI yang membutuhkan dengan baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelayanan perlindungan purna pekerja migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Mater Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna Pekerja Migran Indonesia sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023, pelaksanaan Peraturan No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI ini masih membutuhkan tenaga kerja, dana, dan fasilitas yang memadai dan berkualitas, proses komunikasi di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan instansi terkait dan LSM sedang berupaya agar tidak ada lagi miskomunikasi dengan mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan rutin, sikap para pelaksana dalam memahami dan menanggapi kebijakan ini sudah ada kemajuan menjadi lebih baik, pelaksana kebijakan di tingkat pusat dan daerah memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi, Dalam segi wewenang, SOP, dan juga mekanisme yang dilakukan BP2MI dan instansi terkait sudah lebih baik demi meningkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat dibutuhkan demi mendukung suatu keberhasilan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang telah ditetapkan terhadap proses implementasi kebijakan program.

Daftar Pustaka : 25 Referensi (1996-2023)

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pekerja Migran Indonesia, Pelayanan, Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM

Thesis, August 2024

DESTI SETIAWATI

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION AND SOCIAL
REINTEGRATION POLICIES IN RETIRED PROTECTION SERVICES FOR
INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) IN THE ASIA AND AFRICA REGION**

XVI+180 Pages+1 Table+6 Attachments

ABSTRACT

BP2MI provides protection services for Indonesian Migrant Workers (PMI), one of which is Social Rehabilitation and Reintegration services. Based on BP2MI data, the failure of social rehabilitation and reintegration program services has resulted in services for retired Indonesian migrant workers being ineffective and of poor quality. The Indonesian Ombudsman conducted a study regarding Social Rehabilitation and Social Reintegration Services for retired PMIs which did not provide services to retired PMIs who needed them properly. This type of research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. This research aims to determine and analyze the implementation of social rehabilitation and social reintegration policies in post-secondary protection services for Indonesian migrant workers in Asia and Africa. This research uses Van Mater Van Horn's theory of policy implementation. The results of the research show that in measuring the success of the implementation of social rehabilitation and social reintegration policies for retired Indonesian Migrant Workers that have been implemented in accordance with BPPMI Regulation Number 6 of 2023, the implementation of Regulation No. 6 of 2023 concerning Rehabilitation and Social Reintegration of Retired PMIs still requires workforce, funds, and adequate and quality facilities, the communication process at the Indonesian Migrant Worker Protection Agency with related agencies and NGOs is working to ensure there is no more miscommunication by holding coordination meetings and regular meetings, the attitude of implementers in understanding and responding to this policy has made progress for the better. , policy implementers at the central and regional levels have a good understanding of the objectives, benefits and mechanisms of social rehabilitation and reintegration policies. In terms of authority, SOPs and also the mechanisms implemented by BP2MI and related agencies are better in order to improve social rehabilitation and reintegration after PMI, the social, economic and political environment are very much needed to support the success of the social rehabilitation and post-PMI social reintegration policies that have been established in the program policy implementation process.

Bibliography: 25 References (1996-2023)

Keywords: Policy Implementation, Indonesian Migrant Workers, Services, Social Rehabilitation, Social Reintegration